

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sektor publik di Indonesia pasca reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah melalui laporan keuangan yang melaporkan aktivitas pengelolaan keuangan di institusi pemerintah. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam entitas pemerintah sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga angka yang tercantum di laporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya. Dengan demikian terjadilah reformasi sektor publik dimana tidak hanya sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan Pemerintahan yang bersih (*good governance*) benar-benar tercapai (Mardiasmo, 2004).

Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya berdampak terhadap reformasi anggaran (*budgeting reform*) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut diharapkan dapat memudahkan proses pengawasan anggaran pemerintah daerah.

Saat ini pemerintah daerah dalam menyusun anggaran memakai pola Anggaran partisipatif, adapun yang dimaksud dengan Anggaran partisipatif adalah sebuah proses yang menggambarkan dimana individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran yang mempunyai pengaruh terhadap target anggaran, dan perlunya penghargaan atas pencapaian anggaran tersebut (Falikhatun, 2007). Semakin tinggi keterlibatan individu dalam hal ini adalah

manajer tingkat bawah, maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan bersama tersebut. Namun, keterlibatan manajer tingkat bawah dalam penyusunan anggaran terkadang menimbulkan masalah lain yaitu kecurangan akuntansi atau yang lebih dikenal dengan *fraud*.

Ikatan Akuntan Indonesia (2001) menjelaskan bahwa, kecurangan akuntansi sebagai (1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui para pemakai laporan keuangan, (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering kali disebut sebagai penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal. Menurut Puspasari (2012), secara umum perilaku ilegal adalah bagian dari perilaku tidak etis, kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika. Oleh karena itu, ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakkan standar moral. Penelitian Puspasari (2012) menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi.

Banyaknya kasus kecurangan diakibatkan karena tidak adanya sistem pengendalian internal sehingga lemahnya pengawasan atau kontrol, tidak adanya kejujuran, peraturan dan kinerja kerja lemah sehingga para pembuat kejahatan leluasa dapat melakukan aksinya. Selain itu kecurangan juga bisa berhubungan dengan karakter manusia itu sendiri. Karakter manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menyarankan bahwa kejujuran dan keadilan itu sangatlah penting dan tidak boleh dihilangkan dan harus ditingkatkan dan dipertahankan agar bisa memondasi diri kita sendiri untuk tidak melakukan kecurangan.

Kecurangan di pemerintahan sudah sering terjadi hal ini dibuktikan dengan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menjelaskan bahwa terdapat sejumlah 139 kasus korupsi pada semester 1 tahun 2018 yang ditangani oleh aparat penegak hukum

dan menetapkan 351 tersangka. Adapun dari jumlah kasus tersebut, modus penyalahgunaan korupsi, mark up, tindakan suap, pungutan liar, penggelapan, laporan fiktif dan penyalahgunaan wewenang. Sementara kerugian negaranya mencapai Rp 569 miliar.

Terkait dengan fenomena yang terjadi di Pemerintah Daerah Kota Ternate, pada realisasi perjalanan dinas tersebut ada indikasi kerugian daerah sebesar Rp 1,5 miliar. Dimana perjalanan dinas tersebut terjadi pada tahun anggaran 2016. Kemudian, pada indikasi kerugian daerah tersebut juga ditemukan kondisi yang tidak wajar dalam pelaksanaannya. Terdapat perbedaan harga tiket antara bukti pertanggungjawaban dengan harga pada data manifes maskapai penerbangan. Dimana, harga pada tiket yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban lebih mahal daripada harga tiket pada manifes maskapai penerbangan sebesar Rp317.743.277 di Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu juga ditemukannya perbedaan nama pelaksanaan perjalanan dinas yang tertera pada tiket yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan nama penumpang yang tertera pada manifes maskapai penerbangan sebesar Rp21.654.000 di Sekretaris DPRD. Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya juga ditemukan di Dinas Tatakota dan Pertamanan sebesar Rp150.557.000. (**Klikanggaran.com, 15-03-2018**)

Kecurangan akuntansi yang terjadi di kota Ternate ditunjukkan dengan adanya Tata kelola keuangan pemerintah daerah yang belum maksimal. Buktinya, hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menyuguhkan banyaknya temuan penggunaan anggaran yang tak sesuai aturan. Bahkan ada temuan yang belum terselesaikan sejak 2005 silam. Kepala BPK Maluku Sri Haryoso Sulisyanto mengatakan, nilai sebesar ini ditemukan dalam pemeriksaan sejak 2005 sampai saat ini. Sri Haryoso (2016) dalam media workshop di kantor BPK Maluku Utara, dalam workshop dengan tema Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Maluku Utara tersebut, memaparkan jumlah temuan Pemerintah Daerah kota Ternate sebanyak 400 temuan dengan nilai Rp 109,17 miliar (Malut Post, 2016)

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi yaitu pengendalian internal. Menurut Hesti (2012) tindakan kecurangan dapat dipengaruhi oleh

adanya system pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Wilopo, (2006) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika sistem pengendalian internal lemah maka akan menyebabkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang tidak teliti dan tidak dapat di percaya, tidak efektif dan efisiennya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kegiatan manajemen yang ditetapkan. Apabila pengendalian internal dalam suatu perusahaan telah efektif, maka dapat memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

Pengendalian internal berperan dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Tidak hanya dengan sistem pengendalian internal, kepatuhan juga dibutuhkan didalamnya. Walaupun pengendalian internal dilaksanakan secara efektif dalam sebuah organisasi, nilai-nilai etika juga diperlukan dalam organisasi sehingga munculnya perilaku yang tidak etis dan kecenderungan kecurangan dapat ditekan. Penelitian Puspasari dan Suwardi (2012) menyimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi artinya apabila efektivitas pengendalian internal semakin meningkat, bisa menurunkan kecenderungan kecurangan (*Fraud*) akuntansi. Penelitian Prawira (2014) dan Hamdani, (2017) menyimpulkan pengendalian internal yang baik akan mempengaruhi individu untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Frilia (2015) menemukan hasil yang berbeda yaitu pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain pengendalian internal faktor lain seperti kesesuaian kompensasi juga mempengaruhi kecurangan akuntansi.

Kesesuaian kompensasi juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Kesesuaian kompensasi sangat berpengaruh terhadap perilaku pegawai atau karyawan, biasanya seseorang akan berperilaku tidak etis dan berlaku curang untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri karena ketidakpuasan atau kekecewaan dengan kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan (Shintadevi, 2015). Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pegawai dan mengurangi tingkat kecurangan (*fraud*).

Kompensasi menurut Hasibuan (2003) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan ke perusahaan. Jika di kelola dengan baik, kompensasi akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, serta menjaga karyawan dengan baik, sebaliknya tanpa kompensasi yang cukup (sesuai dan adil) karyawan yang ada akan sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan.

Akibat dari ketidakpuasan pembayaran yang dirasa kurang dan tidak adil akan mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-keluhan, mogok kerja dan mengarah kepada tindakan-tindakan fisik dan psikologis seperti meningkatkan derajat ketidakhadiran dan kecurangan. Zainal, (2013). Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nababan, (2017) yang menemukan hasil bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Bertenputra (2016) menemukan hasil yang berbeda yaitu kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain kesesuaian kompensasi, asimetri informasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi.

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana *agent* memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak *principal*. Menurut Wilopo, (2006) mencatat bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen dipengaruhi oleh situasi asimetri informasi. Asimetri informasi adalah situasi ketika terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang menyediakan

informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri informasi muncul ketika *agent* lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan *principal* dan stake holder lainnya. Frilia (2015), menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*), yaitu *principal* (pemilik/atasan) memberikan wewenang kepada agen untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya.

Asimetri informasi merupakan situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Wilopo, 2006). Pengelola organisasi lebih banyak mengetahui informasi internal dibandingkan dengan pihak pengguna laporan keuangan, sehingga kondisi tersebut dapat membuat pengelola tertentu lebih leluasa atau berkesempatan untuk memanipulasi laporan keuangan yang disajikan dikarenakan ketidaktahuan pengguna eksternal tentang angka dari laporan keuangan yang sebenarnya (Kusumastuti, 2012). Dengan adanya ketidakselarasan tersebut, dapat menjadi penyebab salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Indriastuti *et all* (2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya asimetri informasi informasi yang tinggi, akan memperbesar kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain asimetri informasi, motivasi individu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi.

Menurut Kartono (2002), motivasi berasal dari kata Latin "*motivius*" artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Menurut Siagian (2007), sasaran dari teori motivasi adalah pemuas kebutuhan yang bersifat primer. Motivasi untuk berbuat kecurangan berhubungan dengan motivasi negatif. Motivasi negatif adalah perilaku yang berangkat dari pengutamaan kepentingan-kepentingan pribadi, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan kelompok atau kepentingan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh motivasi yaitu *need* (kebutuhan). Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang

akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun.

Tingkat kecurangan dapat diukur dengan seberapa besar tingkat keserakahan (*greed*) seseorang. Keserakahan ditimbulkan oleh perilaku buruk seorang individu dan juga berperilaku etis yang merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan adalah menyalahgunakan jabatan dan adanya kebiasaan berjudi yang berkaitan dengan buruknya moral seseorang dan dalam motivasi seberapa besar kebutuhan (*need*) seseorang juga berpengaruh terhadap kecurangan, motivasi disini adalah motivasi negatif. Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun.

Menurut Amrizal (2004) dalam suatu organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan salah tersebut bahkan dipandang sudah hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral akan menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya akan merusak bahkan dapat menghancurkan organisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Henzani dan Kurniawan (2013) yang menemukan hasil bahwa adanya pengaruh motivasi terhadap kecurangan akuntansi. Pada penelitian yang dilakukan Ade, (2017) menemukan hasil yang sama dan dapat disimpulkan bahwa motivasi negatif dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi. Selain motivasi, faktor lain seperti moralitas individu juga mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal. Faktor individual berhubungan dengan perilaku yang melekat dari individu itu sendiri, dalam kaitannya faktor individu ini berhubungan dengan moralitas.

Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level

penalaran moral Individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi (Wilopo, 2006). Kecurangan akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat moralitas individu tersebut karena hal tersebut merupakan perilaku yang ilegal. Menurut Hernandez dan Groot (2007) perilaku ilegal menjadi bagian dari perilaku tidak etis, sehingga perlu adanya ketentuan hukum yang mengikat sebagai salah satu usaha penegakkan standar moralitas individu agar kehidupan masyarakat seluruhnya dapat terjaga.

Beberapa penelitian di bidang etika menggunakan teori perkembangan moral untuk mengobservasi dasar individu melakukan suatu tindakan. Salah satu yang sering digunakan adalah teori mengenai level penalaran moral Kohlberg. Mengetahui level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika, berdasarkan level penalaran moralnya. Udayani (2017) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya.

Wilopo (2006) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi. Bernardi dan Guptill (2008) menemukan bahwa semakin tinggi level moral individu akan semakin sensitif terhadap isu-isu etika. Akan tetapi Budiantari *et al* (2017) menemukan hasil yang berbeda yaitu level penalaran moral individu tidak mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain faktor rasionalisasi yang berkaitan erat dengan etika, faktor lain yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi adalah faktor kesempatan. Salah satu penyebab adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan akuntansi adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya pengendalian internal organisasi.

Penelitian ini direplikasi dari penelitian Zainal (2013). Perbedaan penelitian terdahulu dan Penelitian saat ini yaitu Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel pengendalian internal, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi. Sedangkan penelitian saat ini menambahkan dua variable yaitu variabel motivasi individu dan moralitas individu dengan mengacu pada penelitian Kurniawan (2013). Perbedaan ini untuk melihat apakah

pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, motivasi individu dan moralitas individu berpengaruh pada kecurangan akuntansi.

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
4. Apakah motivasi individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
5. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi.
2. Mengetahui pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap kecurangan akuntansi.
3. Mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi.
4. Mengetahui pengaruh motivasi individu terhadap kecurangan akuntansi.
5. Mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bukti empiris mengenai kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan kedepannya bisa menjadi acuan bagi peneiltian selanjutnya yang akan meneliti, dan dapat menambah wawasan ilmiah terkait dengan kecurangan akuntansi.

3. Manfaat Kebijakan

Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Ternate untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kecurangan di instansi pemerintah dan mengatasi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan akuntansi oleh pejabat pemerintah.